

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh

I Putu Surya Wicaksana Putra, NIM. 1614101080

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui dan memahami mengenai terkait pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia, serta (2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang akan dimasukkan atau diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa atau sarana dari orang yang mengaku memiliki keahlian supranatural (dukun atau paranormal) untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan pada usaha pecegahan (prevensi) adanya tindakan praktek santet oleh para dukun atau paranormal. Yang akan dicegah atau diberantas adalah profesi atau pekerjaan dukun santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan begitu yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau membuat celaka orang lain.

Kata Kunci : Santet, Kriminalisasi, Kebijakan hukum pidana.

LEGAL CONTROL POLICY IN CRIMINAL LAW WITCHCRAFT INDONESIA

By

I Putu Putra Surya Wicaksana, NIM. 1614101080

Study Program Law Science

ABSTRACT

This study was conducted to (1) know and understand the relevant legal considerations about the setting of witchcraft in the Indonesian criminal law, and (2) To examine and analyze the criminal law policy of the arrangement of witchcraft in the Indonesian criminal law. This type of research is used in legal research is empirically normative law that legal research done by researching library materials or secondary data that by studying and reviewing the legal principles and rules of positive law derived from the materials of literature and legislation -invitation. The approach used is a problem that law approach, conceptual approach and the approach to the case. Results of research on criminal law policy against the crime of witchcraft that that will be incorporated or organized under the concept of the draft Penal (Penal Code) is not a crime of witchcraft but the offense related to the problem of black magic (the magic and the supernatural), especially with regard to offer help services or facilities from people claiming to have supernatural skills (shaman or paranormal) to commit a crime or a criminal act. In criminalizing acts related to persantetan, the bill of the Criminal Code only focuses on prevention efforts (prevention) their actions witchcraft practices by quacks or paranormal. Which would be prevented or eradicated is a profession or occupation shaman who provides assistance to a person to cause death or harm the others.

Keywords : *Witchcraft, Criminalization, Criminal Law Policy.*